

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran merupakan bentuk nyata dari proses pendidikan. Keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, menjadi salah satu alasan proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar proses pembelajaran. Pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik karena peserta didik dipandang sebagai salah satu sumber untuk apa yang akan dijadikan bahan pelajaran agar kemampuan dasar peserta didik dapat dikembangkan secara optimal.

Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Oleh karena itu, proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilakukan secara asal- asalan melainkan proses yang dilakukan dan diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi

dirinya sehingga akhir dari proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, keberhasilan proses pembelajaran juga sangat ditentukan oleh proses perencanaan, guru dituntut untuk mampu membuat suatu perencanaan pembelajaran yang baik.

Kurikulum 2013, materi pelajaran yang terhimpun dalam tema diajarkan dengan pendekatan saintifik yang dalam prosesnya tidak bersifat linear tetapi selalu terkait satu konsep dengan konsep lainnya. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir, namun proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan saintifik lebih menekankan pada keterampilan proses. Hal itu didukung dengan model pembelajaran tematik yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) berpusat pada peserta didik, 2) memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, 3) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, 5) bersifat fleksibel, 6) hasil pembelajaran dapat dikembangkan sesuai minat dan kebutuhan peserta didik, (Ahmadi Khoiru dan Sofan Amri, 2014: 192).

Nilai dasar Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan secara konkret dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013). Perangkat perundang-undangan tersebut selanjutnya dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jika nilai-nilai instrumental dan semua peraturan perundang-undangan yang benar-benar

merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila tersebut ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka nilai praktis dari Pancasila itu sendiri telah diamalkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan tercermin karakter kewarganegaraan yang baik.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk membentuk watak kewarganegaraan sangat penting dilakukan pada semua warga negara dengan memperhatikan usia dan tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan wahana yang paling efektif untuk membentuk dan mengembangkan watak kewarganegaraan setiap warga negara. Pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan watak kewarganegaraan seperti yang dijelaskan di atas sangat penting untuk diselenggarakan, terutama oleh lembaga pendidikan formal tingkat dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila harus berlangsung sejak dini sehingga dapat mengakar pada diri setiap individu dan membentuk watak kewarganegaraan pada tiap diri individu.

Upaya pembentukan watak kewarganegaraan itu pun merupakan upaya untuk mewujudkan salah satu dari tujuan pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan Nasional yang termaktub dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwasanya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pendidikan Nasional tidak hanya untuk mencetak generasi yang cerdas secara intelektual saja namun juga mencetak generasi yang berwatak atau berkarakter kewarganegaraan. Konteks pendidikan membahas pengembangan *civic disposition* (watak kewarganegaraan) ini sebagian besar terangkum dalam ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan Nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Pada pasal berikutnya yaitu Pasal 37 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa pada ayat pertama kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal; pada ayat kedua yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan wajib mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan urgensi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu sarana untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan pendidikan Nasional. Dengan demikian, mata pelajaran PKn berkontribusi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hubungan berbagai bidang pelajaran dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional terangkum dalam buku karya Darsono tahun 2008. Pelajaran IPS

contohnya, sebagai titik tolak proses belajar berkaitan dengan proses pendidikan pancasila dan kewarganegaraan membangun sikap kreatif dan tanggung jawab serta sikap mencintai bangsa dan sesama manusia sesuai dengan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yakni komitmen terhadap norma yang berlaku atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai filsafat negara, referensi yang dinyatakan dalam situasi hubungan antara manusia di sekolah dan di masyarakat sesuai dengan konsep pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013.

Salah satu problematika dalam implementasi pembelajaran PKn di sekolah dasar di gugus sekolah II kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan yaitu berkaitan dengan kemampuan dan upaya guru dalam membelajarkan tiga komponen *civic education*, guru dari kelas satu hingga kelas enam memahami bahwa pembelajaran PKn membelajarkan siswa mengenai tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun demikian, secara spesifik guru belum familier dengan istilah *civic dispositions* dalam dimensi pengembangan dalam mata pelajaran PKn. Pemahaman guru terhadap butir-butir *civic disposition* pada mata pelajaran PKn juga masih bersifat yang umum-umum saja, yakni merupakan aspek sikap kewarganegaraan siswa pada umumnya. Problematika selanjutnya adalah dalam kurikulum 2013 pembelajaran diajarkan secara tematik, peneliti khawatir bahwasanya pengembangan *civic disposition* cenderung diabaikan karena mata pelajaran PKn tidak diajarkan secara khusus. Kemudian pertanyaan mendasar dalam penelitian ini ialah apakah dalam pembelajaran tematik yang di dalamnya memuat topik pembelajaran PKn guru dapat mengembangkan aspek *civic disposition* (watak kewarganegaraan)?.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terhadap Pengembangan *Civic Disposition* Siswa Kelas V Guslah II Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan” untuk menjawab dan menemukan solusi permasalahan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik di Guslah II Kec Sukorejo Kab Pasuruan dalam mengembangkan *civic disposition* (watak kewarganegaraan)?
- 2) Bagaimana kendala pelaksanaan pembelajaran tematik di Guslah II Kec Sukorejo Kab Pasuruan dalam mengembangkan *civic disposition* (watak kewarganegaraan)?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik di Guslah II Kec Sukorejo Kab Pasuruan dalam mengembangkan *civic disposition* (watak kewarganegaraan).
- 2) Mendeskripsikan kendala pelaksanaan pembelajaran tematik di Guslah II Kec Sukorejo Kab Pasuruan dalam mengembangkan *civic disposition* (watak kewarganegaraan).

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dalam proses pembelajaran terkait pengembangan *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan), khususnya bagi pihak-pihak yang ikut serta dalam penelitian ini. Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Bagi Siswa

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini bagi siswa sebagai berikut.

- a. Menambah pengetahuan siswa akan pentingnya aktif mengikuti kegiatan pembelajaran tematik.
- b. Melatih siswa untuk menunjukkan watak kewarganegaraan melalui pelaksanaan pembelajaran dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Bagi Sekolah

Beberapa manfaat yang dapat diberikan bagi sekolah sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi kepada sekolah bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik dapat dijadikan sebagai sarana dampak pengiring untuk mengembangkan *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) pada peserta didik.
- b. Sebagai upaya sekolah untuk meningkatkan koherensi kegiatan pembelajaran tematik demi terwujudnya pelayanan pendidikan yang lebih baik dan bermakna.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat kepada peneliti sendiri, sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi mengenai butir-butir nilai *civic disposition* yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran tematik.

- b. Sebagai referensi dalam mengkaji proses Pelaksanaan pembelajaran tematik yang berkaitan dengan pengembangan *civic disposition*.

1.4 Asumsi

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa asumsi yaitu sebagai berikut.

- 1) Guslah II Kec Sukorejo Kab Pasuruan telah melaksanakan pembelajaran tematik pada kelas I, II, II, IV, V dan VI.
- 2) Terdapat beberapa butir nilai *civic disposition* yang dapat dikembangkan melalui pelaksanaan pembelajaran tematik pada diri siswa kelas V Guslah II Kec Sukorejo Kab Pasuruan